



Relasi Kuasa Dan Wacana Anti - Korupsi: Analisis Kritis Terhadap Pernyataan "Maafkan Koruptor" Prabowo Subianto

Yosua Fernando Hose Sihite

Study Program of Communication Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: yosuafhs@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [26 Mei 2025]

Revised [12 Desember 2025]

Accepted [20 Desember 2025]

KEYWORDS

Critical Discourse Analysis,
Statement, Prabowo Subianto,
Controversy, Corruption.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto mengenai pengampunan bagi koruptor yang disampaikan di Kairo, Mesir, pada 18 Desember 2024. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) tiga dimensi dari Norman Fairclough, penelitian ini menganalisis makna, kekuasaan, dan ideologi dalam wacana tersebut. Pada dimensi teks, ditemukan strategi ambiguitas melalui diksi informal, modalitas tidak pasti, dan struktur bahasa yang bersifat paternalistik. Di tingkat praktik wacana, pidato mengalami pergeseran makna saat disampaikan media, dari dokumentasi resmi menjadi isu kontroversial. Sementara pada dimensi sosiokultural, wacana ini mencerminkan kecemasan publik terhadap korupsi serta upaya pemanfaatan otoritas presiden untuk membentuk opini. Hasilnya menunjukkan bahwa pernyataan tersebut merupakan praktik hegemonik yang menormalisasi kompromi terhadap akuntabilitas hukum dan memperkuat relasi kuasa.

ABSTRACT

This research examines President Prabowo Subianto's controversial statement on forgiveness for corruptors delivered in Cairo, Egypt, on December 18, 2024. Using Norman Fairclough's three-dimensional Critical Discourse Analysis (CDA) method, this research analyzes the meaning, power, and ideology in the discourse. In the text dimension, ambiguity strategies were found through informal diction, uncertain modality, and paternalistic language structure. At the level of discourse practice, the speech experienced a shift in meaning when delivered by the media, from official documentation to controversial issues. While at the sociocultural dimension, this discourse reflects public anxiety about corruption as well as efforts to utilize presidential authority to shape opinions. The results show that the statement is a hegemonic practice that normalizes compromises to legal accountability and strengthens power relations.

PENDAHULUAN

Pernyataan publik yang disampaikan oleh pejabat negara atau tokoh politik kerap menjadi sorotan, terutama bila mengandung potensi kontroversial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontroversi diartikan sebagai perdebatan atau pertentangan yang mencerminkan perbedaan pandangan dalam masyarakat (Setiawan, n.d.). Dalam konteks komunikasi publik, hal ini menjadi cerminan bagaimana bahasa dapat memicu beragam interpretasi serta menggambarkan relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi di ruang sosial. Salah satu pernyataan yang menuai perhatian luas adalah pernyataan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dalam kunjungannya ke Mesir pada 18 Desember 2024. Saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Prabowo menyampaikan, "Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan" (Kompas.com, 2024). Ucapan ini memunculkan polemik karena dianggap membuka peluang pengampunan terhadap pelaku korupsi, asalkan aset dikembalikan. Pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat serta memunculkan respons dari tokoh publik seperti Mahfud MD dan Saut Situmorang.

Media massa memainkan peran penting dalam menyebarluaskan dan membingkai pernyataan tersebut. Melalui teknik framing, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi publik yang dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi tokoh politik. Dalam prosesnya, media kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi yang melekat dalam struktur institusionalnya (Khumairoh, 2021; Made Dwi Narita Kusumawardani et al., 2022). Korupsi sendiri merupakan masalah struktural yang belum terselesaikan di Indonesia. Berdasarkan data (*Transparency International*, 2024), Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 37/100. Hal ini menunjukkan bahwa isu korupsi masih menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius. Oleh karena itu, setiap pernyataan pemimpin terkait korupsi berpotensi menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan politik yang luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana media terhadap pernyataan Prabowo menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Model ini mencakup tiga dimensi: analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial-budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah struktur bahasa dalam kaitannya dengan kekuasaan, ideologi, serta dinamika sosial-politik yang lebih luas (Fairclough, 1995). Dalam konteks ini, bahasa dilihat sebagai alat pembentuk realitas sosial yang sarat makna politis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian linguistik kritis dan komunikasi politik, serta implikasi praktis bagi perumusan strategi komunikasi publik yang lebih bertanggung jawab, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti pemberantasan korupsi.

LANDASAN TEORI

Wacana dan Kekuasaan

Wacana didefinisikan sebagai rangkaian ujar atau tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal secara teratur dan sistematis dalam satu kesatuan yang koheren. Namun, dalam kerangka analisis kritis, wacana dipahami lebih dari sekadar kumpulan kata atau teks. Michel Foucault memandang wacana sebagai praktik sosial yang sarat dengan kekuasaan, yang menentukan apa yang bisa dikatakan, oleh siapa, dan dalam konteks apa. Kekuasaan menurut Foucault bukanlah sesuatu yang dimiliki secara hierarkis, melainkan relasi-relasi beragam yang tersebar seperti jaringan dan bekerja melalui mekanisme disiplin, regulasi, serta kontrol dalam masyarakat (Foucault, 1980; Mughis Mudhoffir, 2013). Dengan demikian, wacana menjadi arena di mana kekuasaan beroperasi dan pengetahuan diproduksi.

Teori Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah pendekatan studi linguistik yang membahas wacana dengan mengaitkannya pada konteks. AWK tidak hanya berfokus pada struktur linguistik, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan dan ketidakadilan sosial (Fairclough, 1995). Tujuannya adalah untuk mengungkap praktik diskursif yang sering kali tersembunyi yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan hegemoni mereka.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Terdapat tiga dimensi yang dianalisis dalam analisis wacana kritis (AWK) model Norman Fairclough. Tiga dimensi analisis yaitu; analisis teks (mikrostruktur): Analisis linguistik meliputi diksi, struktur gramatikal, dan modalitas. Praktik wacana (mesostruktur): Fokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks oleh media. Analisis praktik sosial-budaya (makrostruktur): Menelaah konteks sosial-politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh wacana tersebut. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari video pidato yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, Kompas.com, dan Metro TV di YouTube. Data sekunder berupa literatur terkait komunikasi politik, media, dan teori wacana. Penelitian ini secara spesifik menggunakan model AWK yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Menurut Fairclough, AWK merujuk pada penggunaan bahasa yang menyebabkan kelompok-kelompok sosial saling bertarung dan mengusung ideologi masing-masing. Model ini membagi analisis ke dalam tiga dimensi yang saling berhubungan:

- A. Analisis Teks (Mikro): Mendeskripsikan properti linguistik teks seperti kosakata dan tata kalimat
- B. Analisis Praktik Wacana (Meso): Menginterpretasikan hubungan antara proses produksi, distribusi, dan konsumsi dari sebuah teks.
- C. Analisis Praktik Sosiokultural (Makro): Memberikan penjelasan mengenai hubungan antara proses wacana dengan proses sosial yang lebih luas, yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dimensi Teks (Mikro)

Pada level teks, pernyataan Prabowo Subianto, "Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan" dan "Tapi kembalikan dong, nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya enggak ketahuan...", menunjukkan strategi linguistik yang kompleks.

Diksi

Terdapat perpaduan antara istilah formal bermuatan moral ("koruptor", "mencuri dari rakyat") dengan sapaan informal dan personal ("hai", "kau"). Penggunaan partikel persuasif seperti "dong" dan "loh ya" menciptakan relasi kuasa yang bersifat paternalistik, memosisikan pembicara sebagai figur otoritas yang menasihati bawahannya. Frasa "diam-diam supaya enggak ketahuan" secara eksplisit menawarkan solusi yang mengabaikan prinsip transparansi.

Modalitas Epistemik

Penggunaan kata "mungkin" dalam frasa "ya mungkin kita maafkan" menciptakan modalitas epistemik dengan tingkat kepastian yang rendah. Ini melemahkan janji pengampunan dan menciptakan ambiguitas yang strategis. Demikian pula, kata "bisa" dalam frasa "bisa diam-diam" merepresentasikan kemungkinan, bukan kepastian. Strategi ketidakpastian linguistik ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial

Tata Bahasa

Struktur kalimat bersyarat "kalau.. ya mungkin.." menegaskan posisi pembicara sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan pengampunan. Penggunaan kalimat imperatif "kembalikan dong" dan pengulangan leksikal ("kembalikan") berfungsi sebagai penekanan yang kuat, namun disandingkan dengan tawaran yang mengakomodasi praktik tersembunyi. Pilihan-pilihan kebahasaan ini secara keseluruhan berfungsi sebagai praktik wacana yang mereproduksi relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Analisis Dimensi Praktik Wacana (Meso)

Analisis praktik wacana memfokuskan wacana pada tiga level yaitu produksi, penyebaran teks, dan konsumsi teks.

Produksi Teks

Teks pidato diproduksi dalam sebuah acara kenegaraan resmi. Kanal YouTube Sekretariat Presiden memproduksinya dengan tujuan dokumentasi dan hubungan masyarakat, tercermin dari judulnya yang formal dan deskriptif: "Presiden Prabowo Bertemu dengan Mahasiswa Indonesia di Kairo, 18 Desember 2024". Sebaliknya, media komersial seperti Kompas.com dan Metro TV memproduksi ulang konten tersebut dengan menyoroti aspek kontroversial untuk menarik audiens.

Distribusi Teks

Tabel 1. Media Distribusi Wacana

No	Media	Judul
1	Kompas.com	[FULL] Pidato Prabowo di Kairo: Singgung Gus Dur, Hitung Koruptor yang Ditangkap
2	Metro TV	Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Taubat, Tapi: "Kembalikan Yang Kau Curi"
3	Sekretariat Presiden	Presiden Prabowo Bertemu dengan Mahasiswa Indonesia di Kairo, 18 Desember 2024"

Sumber: Youtube (Kompas.com, 2024; Presiden, 2024; TV, 2024)

Meskipun konten video yang didistribusikan pada dasarnya sama, terjadi transformasi makna melalui proses pembingkaihan (*framing*) pada judul. Metro TV menggunakan judul provokatif, "Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Taubat, Tapi: 'Kembalikan Yang Kau Curi'", yang secara efektif menetapkan sudut pandang awal bagi publik dan memicu polemik. Kompas.com juga menyoroti poin-poin menarik untuk audiens jurnalistik. Perbedaan inilah yang mengakselerasi viralitas wacana tersebut.

Konsumsi Teks

Wacana ini dikonsumsi secara terpolarisasi oleh masyarakat. Sebagian publik mendukungnya sebagai pendekatan pragmatis untuk pengembalian aset negara. Namun, sebagian besar lainnya,

termasuk tokoh publik seperti Mahfud MD dan Saut Situmorang, mengkritiknya karena dinilai berisiko mendelegitimasi penegakan hukum dan mengabaikan efek jera. Pernyataan ini menjadi arena pertarungan makna (*struggle over meaning*) di ruang publik, di mana setiap kelompok memaknainya sesuai kerangka ideologis masing-masing.

Analisis Dimensi Praktik Sosiokultural (Makro)

Level Situasional

Konteks langsung dari pernyataan ini adalah acara pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Situasi ini, di mana seorang pemimpin berbicara dengan audiens domestik di panggung internasional, menciptakan dinamika komunikasi yang unik dan memperkuat citra kenegarawanan.

Level Institusional

Wacana ini melibatkan interaksi antar institusi. Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, menggunakan otoritas institusionalnya untuk menetapkan agenda wacana antikorupsi. Institusi media (Kompas, Metro TV) berperan sebagai arena kontestasi yang memperkuat atau menantang wacana tersebut sesuai kepentingan editorialnya. Sementara itu, kanal Sekretariat Presiden berfungsi sebagai aparatus negara yang menyebarkan narasi resmi. Pernyataan ini juga dapat dilihat sebagai kontradiksi terhadap visi dan misi antikorupsi yang dicanangkan pemerintahannya.

Level Sosial

Gambar 1. Survei Ipsos Global, Tingkat kecemasan warga negara terhadap korupsi



Sumber: Goodstats.id (Iswenda, 2024)

Wacana ini beresonansi kuat dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kecemasan tinggi terhadap korupsi. Survei Ipsos Global (Agustus 2024) menunjukkan Indonesia menempati posisi teratas dengan 58% warga mencemaskan korupsi. Tingginya ketidakpercayaan publik terhadap penanganan korupsi membuat setiap pernyataan dari pemimpin negara menjadi sangat sensitif dan memicu perdebatan luas mengenai moralitas, keadilan restoratif, dan supremasi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tiga dimensi Norman Fairclough, disimpulkan bahwa pernyataan kontroversial Prabowo Subianto mengenai pengampunan koruptor merupakan sebuah praktik diskursif yang strategis dan kompleks. Pada level teks, penggunaan diksi, modalitas, dan tata bahasa



yang ambigu secara efektif membangun relasi kuasa paternalistik dan menawarkan solusi pragmatis yang mengorbankan transparansi hukum.

Pada level praktik wacana, pidato resmi ini ditransformasikan oleh media menjadi sebuah polemik nasional melalui proses pembingkai ulang, yang kemudian dikonsumsi secara terpolarisasi oleh masyarakat. Akhirnya, pada level praktik sosiokultural, wacana ini beresonansi kuat dalam konteks sosial di mana kecemasan publik terhadap korupsi sangat tinggi, dengan Presiden menggunakan otoritas institusionalnya untuk menetapkan agenda. Secara keseluruhan, pernyataan "Maafkan Koruptor" berfungsi sebagai praktik diskursif hegemonik.

Wacana ini secara aktif membentuk realitas dengan memanfaatkan bahasa untuk menormalisasi kompromi terhadap akuntabilitas, memperkuat relasi kekuasaan yang ada, dan pada akhirnya berpotensi melemahkan fondasi penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan bagi para praktisi politik dan pejabat publik untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih cermat, jelas, dan bertanggung jawab, terutama saat membahas isu-isu sensitif seperti korupsi. Bagi masyarakat dan konsumen media, diharapkan dapat lebih kritis dalam menerima dan menafsirkan wacana politik yang disajikan media, dengan memahami bahwa bahasa dapat digunakan sebagai instrumen kekuasaan dan ideologi. Masyarakat perlu memahami bahwa media memiliki peran dalam membingkai (*framing*) sebuah isu, yang dapat mengubah pidato resmi menjadi arena pertarungan makna.

Oleh karena itu, membandingkan informasi dari berbagai sumber menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari wacana ini terhadap kebijakan pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (C. Gordon (Ed.)). Pantheon Books.
- Iswenda, B. A. (2024). *Indonesia Jadi Negara yang Paling Cemas Terhadap Korupsi*. <https://goodstats.id/article/indonesia-menjadi-negara-paling-cemas-terhadap-korupsi-Ugn0n>
- Khumairoh, U. (2021). Dampak Konglomerasi Media Terhadap Industri Media Massa dan Demokrasi Ekonomi Politik di Era Konvergensi Media. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.05>
- Kompas.com. (2024). Tayangan Youtube Kompas TV dengan Judul "[FULL] Pidato Prabowo di Kairo: Singgung Gus Dur, Hitung Koruptor yang Ditangkap. In *Youtube*. https://youtu.be/73EnzEWg_8k?si=OmRvZTUI_BI11IK-
- Made Dwi Narita Kusumawardani, N., Komang Sri Yulastini, N., Sri Rahayu, D., & Ketut Kusuma Umbarini Sari, N. (2022). *PEMANFAATAN JENIS-JENIS MEDIA BK DI SEKOLAH PADA PEMBELAJARAN DARING*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6390878>
- Mughis Mudhoffir, A. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>
- Presiden, S. (2024). *Presiden Prabowo Bertemu dengan Mahasiswa Indonesia di Kairo, 18 Desember 2024*". <https://youtu.be/dUvWeJ6VSMA?si=AzypUvPt7E-Xf0EM>
- Setiawan, E. (n.d.). *Arti kata kontroversi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved February 12, 2025, from <https://kbbi.web.id/kontroversi>
- Transparency International*. (2024). <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

TV, M. (2024). *Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Taubat, Tapi: "Kembalikan Yang Kau Curi."*
<https://www.youtube.com/watch?v=MZS3SxsjcJU&pp=ygUgcGikYXRvIHByYWJvd28gYWwgYXp oYXIgbWV0cm8gdHY%3D>